

## **IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

### **A. Terbentuknya Kecamatan Pagelaran Utara**

Kecamatan Pagelaran Utara merupakan Kecamatan yang baru terbentuk pada tanggal 30 Agustus tahun 2012. Kecamatan ini terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor : 12 tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Pagelaran Utara di Kabupaten Pringsewu. Berlandaskan Peraturan Daerah ini maka dibentuk Kecamatan Pagelaran Utara di wilayah Kabupaten Pringsewu. Kecamatan Pagelaran Utara sendiri berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Pagelaran yang terdiri atas cakupan wilayah:

1. Pekon Fajar Baru;
2. Pekon Kamilin;
3. Pekon Neglasari;
4. Pekon Mulia;
5. Pekon Margosari;
6. Pekon Giri Tunggal;
7. Pekon Sumber Bandung;
8. Pekon Madaraya;
9. Pekon Way Kunyir; dan
10. Pekon Gunung Raya.

Kecamatan Pagelaran Utara mempunyai batas-batas wilayah:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah;
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu;

3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Tanggamus; dan
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus.

Ibu Kota Kecamatan Pagelaran Utara berkedudukan di Pekon Fajar Mulia.

## **B. Gambaran Umum Pekon Sumber Bandung**

### **1. Sejarah Berdirinya Pekon Sumber Bandung**

Pada tahun 1960, sekelompok penduduk dari Desa Tangkit sedang melakukan pembukaan lahan pertanian dengan mengadakan penebangan hutan di wilayah tepian sungai Way Waya dan menetap di sana. Seiring dengan pertambahan penduduk dan jauhnya desa induk (Tangkit Serdang), maka pada tahun 1967 di wilayah yang diberi nama Sumber Bandung tersebut membentuk pemerintahan sendiri yang dipimpin Kepala Desa yang pertama bernama Bp. M. Hojali (alm) yang terdiri atas tiga dusun yaitu: Sumber Bandung, Menggeh, dan Suka Damai.

Tahun 1982 wilayah dari Pekon Sumber Bandung bertambah dari pecahan wilayah Banjar Agung Ilir sehingga menjadi 7 Dusun. Program transmigrasi lokal saat itu dikarenakan wilayah induk masuk dalam kawasan register 22 reboisasi, penduduk sebagian besar ditranslokkan yaitu pada tahun 1982.

Tahun 1997 diadakan Pilkades dan saat itu Sumber Bandung dipimpin oleh Kades ke-2 yaitu bapak Jaya Ahyar yang memerintah selama 8 tahun, karena Pekon Madaraya memisahkan diri menjadi Pekon sendiri (pemekaran pekon). Seiring dengan berjalannya waktu dusun yang ada di

Pekon Sumber Bandung saat ini hanya 3dusun, yaitu Dusun Sinar Baru, Dusun Way Waya, dan Dusun Suka Rendah.

Kepala Pekon di Sumber Bandung sebagai berikut:

Tabel 3: Daftar nama Kepala Pekon Sumber Bandung

No	Nama Kepala Pekon	Tahun Memerintah
1	Alm. M. Hojali	1967 – 1996
2	Jaya Ahyar	1997 – 2005
3	Ahmad Khusaeri	2005 – 2012
4	Haryadi	2012 – sekarang

Sumber : Demografi Pekon Sumber Bandung, 2012

## 2. Letak Geografis

Secara administratif Pekon Sumber Bandung berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara : Register 22 Way Waya
- b. Sebelah Selatan : Pekon Neglasari, Kec. Pagelaran
- c. Sebelah Barat : Pekon Neglasari, Kec. Pagelaran
- d. Sebelah Timur : Pekon Neglasari dan Madaraya, Kec. Pagelaran

Luas Wilayah Pekon Sumber Bandung sendiri yaitu:

Tabel 4: Luas wilayah Pekon

Pemukiman	30 ha
Pertanian Sawah	15 ha
Ladang / tegalan	25 ha
Hutan	3.852 ha
Perkantoran	1 ha
Sekolah	1 ha
Jalan	168 Km
Lapangan sepak bola	$\frac{3}{4}$ ha

Sumber : Demografi Pekon Sumber Bandung, 2012

Pekon Sumber Bandung sendiri memiliki potensi pertanian yang cukup baik terutama pada beberapa jenis tanaman mengingat luas hutan yang masuk dalam wilayah Pekon Sumber Bandung cukup luas. Adapun jenis tanaman yang berpotensi di Pekon Sumber Bandung yaitu:

1. Padi sawah : 15 ha
2. Padi ladang : 25 ha
3. Kakao / Coklat : 170 ha
4. Sawit : 75 ha
5. Kelapa : 5 ha
6. Kopi : 1.073 ha

Jumlah penduduk Pekon Sumber Bandung adalah 1.745 jiwa dari 865 orang laki-laki dan 880 perempuan, dengan jumlah kepala keluarga 349 KK. Penduduk Pekon sendiri berasal dari penduduk asli keturunan Sunda

dan penduduk pendatang keturunan Lampung. Mata pencaharian penduduk yaitu sebagai petani, pedagang, guru, buruh tani, dan swasta.

### **3. Organisasi Pemerintahan Pekon**

Struktur organisasi pemerintahan Pekon Sumber Bandung terdiri dari:

#### **a. Kepala Pekon**

Kepala Pekon merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan pekon berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan HIPPUN Pemekonan (BHP), dengan kata lain bahwa kepala pekon merupakan pemimpin lembaga eksekutif pekon yang dibantu oleh para perangkat pekon yang telah dibentuk oleh kepala pekon tersebut untuk membantu menjalankan tugas-tugas kepala pekon.

#### **b. Sekertaris Pekon**

Sekertaris Pekon adalah unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekertaris Pekon dan bertanggung jawab kepada Kepala Pekon, dalam rangka membantu Kepala Pekon dibidang administrasi dalam melakukan tugas pokok penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pembinaan administrasi serta memberikan pelayanan teknis maupun administratif kepada masyarakat dan instansi lainnya di tingkat pekon.

#### **c. Kepala Urusan (Kaur) Pekon**

Kedudukannya yaitu sebagai unsur pembantu sekertaris pekon dalam bidang tugasnya. Tugas utama dari Kaur sendiri yaitu menjalankan kegiatan-kesgiatan dari sekertariat dalam bidang tugasnya masing-masing tiap Kaur.

1. Kepala Urusan Pemerintahan

Yaitu unsur pembantu sekretaris pekon di bidang penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab kepada kepala pekon melalui sekretaris pekon.

2. Kepala Urusan Umum

Yaitu unsur pembantu sekretaris pekon dibidang pelayanan umum pemerintahan yang bertanggung jawab kepada kepala pekon melalui sekretaris pekon.

3. Kepala Urusan Pembangunan

Yaitu unsur pembantu sekretaris pekon di bidang pelaksanaan pembangunan yang bertanggung jawab kepada kepala pekon melalui sekretaris pekon.

4. Kepala Urusan Kesra

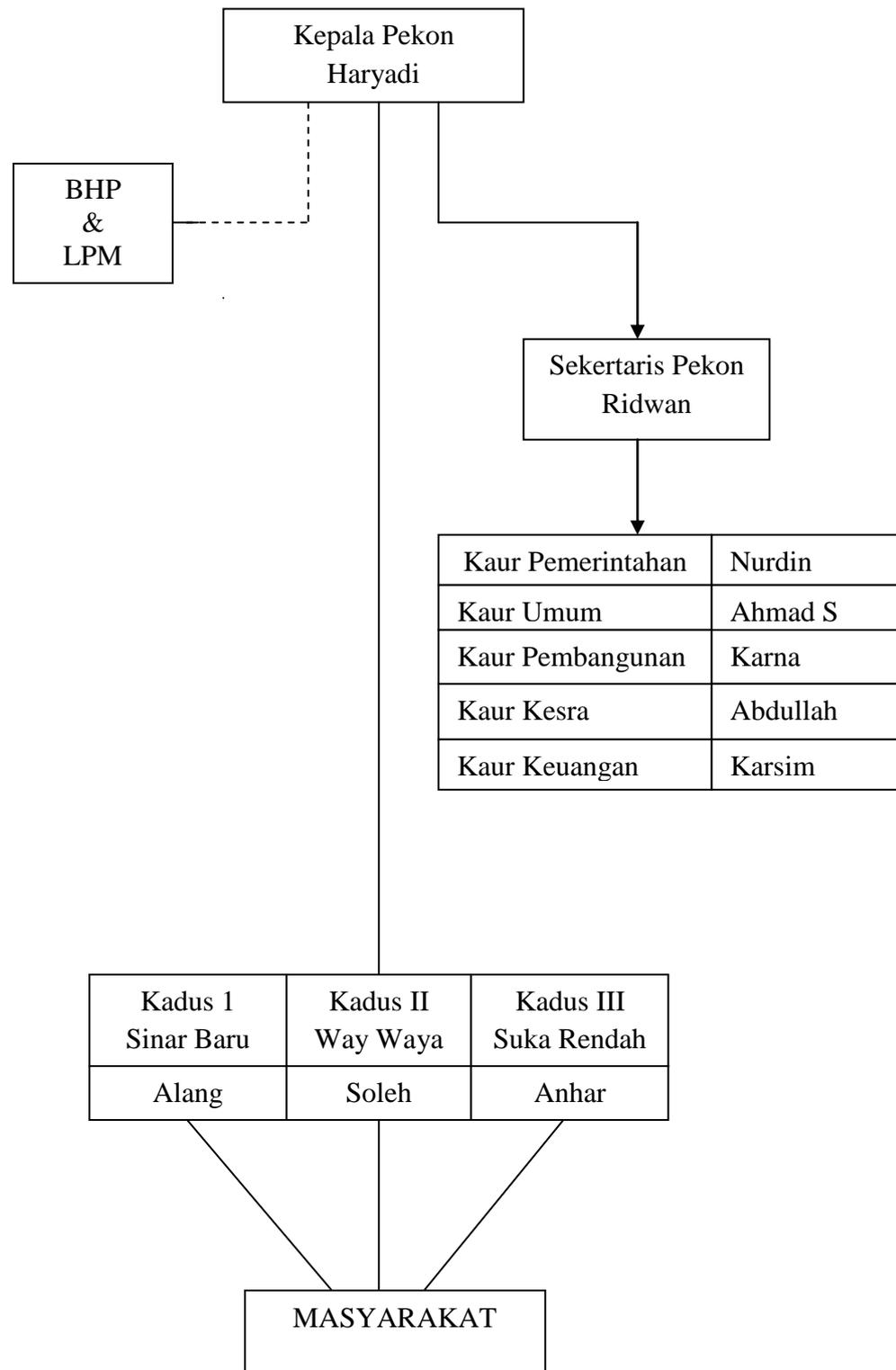
Yaitu unsur pembantu sekretaris pekon di bidang penyelenggaraan kesejahteraan yang bertanggung jawab kepada kepala pekon melalui sekretaris pekon.

5. Kepala Urusan Keuangan

Yaitu unsur pembantu sekretaris pekon di bidang penyelenggaraan administrasi keuangan yang bertanggung jawab kepada kepala pekon melalui sekretaris pekon.

- d. Kepala Dusun

Kepala Dusun berkedudukan sebagai perangkat pembantu kepala pekon dan unsur penyelenggaraan pemerintah pekon di wilayah dusun.



Gambar 2. Struktur Organisasi Pemerintahan Pekon Sumber Bandung.  
Sumber: Demografi Pekon Sumber Bandung, 2012

#### 4. Visi dan Misi Pekon Sumber Bandung

Demokratisasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi dari masyarakat melalui Badan HIPPUN Pemekonan dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada sebagai mitra Pemerintahan Desa / Pekon yang mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa sehingga diharapkan adanya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan seyogyanya benar-benar berdasarkan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat dengan harapan secara bertahap Pekon dapat mengalami kemajuan.

##### a. Visi Pekon Sumber Bandung

Visi dari Pekon Sumber Bandung yaitu “Pada Tahun 2015 Pekon Sumber Bnadung dapat menikmati penerangan, masyarakat aman dan sejahtera”.

Rumusan visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu ungkapan niat yang luhur untuk memperbaiki dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Pekon Sumber Bandung baik secara individu maupun kelembagaan sehingga 5 (lima)

tahun kedepan Pekon Sumber Bandung mengalami suatu perubahan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan.

b. Misi Pekon Sumber Bandung

1. Peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan pekon kepada masyarakat;
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana umum strategis dalam menunjang penghidupan dan ketahanan ekonomi masyarakat; dan
3. Peningkatan peran aktif masyarakat di dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia dan stabilitas keamanan ketertiban masyarakat.